

URGENSI PENANGGUHAN PERMOHONAN PASPOR TERHADAP PEMOHON YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL

ABSTRACT

Nizar Reza Fachruddin

Human cross-border mobility continues to increase alongside globalization, advances in transportation technology, and intensified socio-economic interactions. This development has driven higher demand for Indonesian passports but has also widened opportunities for transnational organized crime (TOC), particularly trafficking in persons and migrant smuggling. One of the most frequently exploited loopholes is the use of false information or unlawful documents in passport applications, revealing weaknesses in early-stage identity verification.

This study examines the urgency of implementing passport-application suspension for applicants who provide false information as a preventive measure against transnational crime. Through an analysis of immigration regulations, international migration dynamics, and document-fraud practices, the study underscores the value of suspension as an early screening tool capable of disrupting potential criminal chains before a passport is issued.

The research further highlights the need for enhanced identity-verification technologies, stronger inter-agency data coordination, improved immigration-officer capacity, and regulatory refinement to ensure that suspension policies have solid legal grounding and remain consistent with due-process principles. Overall, passport-application suspension is shown to be a strategic and necessary response to the growing complexity of TOC, and its effectiveness can be strengthened through clear implementing regulations.

Keywords: Indonesian Passport, Immigration, Passport Application Suspension, Transnational Organized Crime

URGENSI PENANGGUHAN PERMOHONAN PASPOR TERHADAP PEMOHON YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL

INTISARI

Nizar Reza Fachruddin

Meningkatnya mobilitas lintas negara akibat globalisasi dan kemajuan teknologi mendorong lonjakan permohonan paspor di Indonesia, sekaligus membuka celah bagi kejahatan terorganisasi transnasional seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Salah satu modus yang sering digunakan adalah pemberian keterangan palsu dalam permohonan paspor, yang menunjukkan adanya kelemahan verifikasi identitas pada tahap awal penerbitan.

Penelitian ini menelaah urgensi kebijakan penangguhan permohonan paspor sebagai langkah preventif untuk menghentikan potensi penyalahgunaan dokumen perjalanan sebelum paspor diterbitkan. Analisis terhadap regulasi keimigrasian, dinamika migrasi internasional, dan praktik pemalsuan dokumen mengonfirmasi bahwa penangguhan dapat menjadi instrumen pengawasan awal yang efektif.

Kajian ini juga menekankan pentingnya integrasi teknologi verifikasi identitas, koordinasi data antarinstansi, peningkatan kapasitas petugas, serta penguatan dasar hukum yang sejalan dengan prinsip due process. Dengan demikian, penangguhan permohonan paspor merupakan kebijakan strategis dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional modern dan perlu diatur secara lebih tegas melalui peraturan menteri untuk menjamin kepastian dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Kata Kunci : Paspor RI, Keimigrasian, Penangguhan Permohonan Paspor, Kejahatan Terorganisasi Transnasional.